

# Dewan Siap Usut Temuan BPK

## Desak Pemkab Bertanggungjawab

SANGGAU, TRIBUN - Sejak keluarnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas LPJ Bupati terkait pelaksanaan APBD 2010 beberapa waktu lalu dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), DPRD Sanggau siap membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menindaklanjuti beberapa catatan pada LHP BPK tersebut.

Ketua DPRD Sanggau, Andreas Nyas SAg, Selasa (9/8), menjelaskan, Panja bentukan DPRD akan bertugas membahas dan menindaklanjuti LHP dari BPK RI, telah siap untuk bekerja sesuai dengan fungsinya.

Untuk itu dirinya juga meminta Pemkab Sanggau untuk serius menindaklanjuti apa yang menjadi temuan BPK karena berpotensi merugikan negara tersebut.

"Ada beberapa temuan penting yang harus segera ditindaklanjuti Pemkab, antara lain bantuan sosial (Bansos) yang belum memiliki pertanggungjawaban senilai Rp 1,4 miliar, penataan aset yang sudah menjadi warisan periode sebelumnya dan belum diselesaikan, serta beberapa temuan lain yang harus segera ditindaklanjuti," ungkap Andreas.



TRIBUN/DOK

“Selagi masih bisa kita usahakan dikembalikan kepada negara maka akan terus kita upayakan, kecuali jika sudah membentur jalan buntu.”

**Ir SETIMAN H SUDIN**

Bupati Sanggau

“Kita berikan kesempatan akhir tahun 2011. Karena audit BPK ini berpengaruh pada penilaian dari kementerian keuangan setiap tahunnya,” kata Andreas.

**Penataan Aset**  
Menurutnya, kendala berat bagi Pemkab Sanggau dan harus diselesaikan adalah penataan aset. Karena masih banyak aset bergerak dan tidak bergerak yang masih dikuasai oleh mantan pejabat dan belum jelas statusnya.

“Memang perlu komitmen Pemkab Sanggau untuk me-

nyelesaian persoalan ini, khususnya aset yang dikuasai mantan pejabat. Sebenarnya Pemkab bisa melakukan penghapusan aset dan sebagainya, namun perlu keterbukaan dengan kita di DPRD Kabupaten Sanggau apa langkah yang akan diambil agar tidak menyalah-lahokan ketentuan yang ada,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Sanggau Ir Setiman H Sudin, membenarkan, banyak temuan dari hasil audit BPK RI yang harus ditindaklanjuti. Untuk itu pihaknya sudah membentuk dua tim yang bertugas menangani pendataan aset dan mencari penerima Bansos senilai Rp 1,4 miliar tersebut.

“Memang bisa saja kita putihkan aset dan bansos yang sudah menjadi masalah sejak 2006 ini. Hanya saja ada bebe-

rapa ketentuan yang harus dipenuhi. Seperti yang bersangkutan sudah meninggal dunia, atau alasan lain yang lebih memperkuat opini penghapusan,” katanya.

Pemkab Sanggau, dikatakan Setiman, wajib menyelesaikan temuan BPK RI tersebut, jika tidak maka Pemkab Sanggau bisa dianggap melakukan tindakan merugikan negara. Otomatis mereka yang pembawa aset dan penerima bansos harus dipidanakan karena merugikan negara.

“Selagi masih bisa kita usahakan dikembalikan kepada negara maka akan terus kita upayakan, kecuali jika sudah membentur jalan buntu. Ada juga PNS penerima dan harus dipotong gajinya, yang seperti ini kan membutuhkan proses yang cukup panjang tidak bisa langsung diselesaikan begitu saja,” pungkas Setiman. (sbs)



### Hasil Audit BPK RI APBD 2010

- Kredit macet atas investasi non permanen Rp 1,3 miliar
- Belanja penunjang bupati dan wakil bupati Rp 201 juta lebih
- Realisasi belanja modal senilai Rp 440 juta lebih
- Proyek air bersih di Kecamatan Jangkang senilai Rp 14,5 miliar
- Realisasi belanja hibah tanpa SPJ Rp 913 miliar lebih
- Realisasi Bansos tanpa SPJ Rp 896 juta lebih
- Bantuan keuangan ke desa Rp 1,6 miliar tanpa SPJ
- Belanja bagi hasil ke pemerintah desa Rp 167 juta tanpa SPJ

### Temuan Permanen

- Sebanyak 73 lebih kendaraan dinas dikuasai oleh mantan pejabat statusnya belum jelas
- Bantuan sosial Rp 1,4 miliar (sejak 2006)

Sumber: Audit BPK RI Bupati Sanggau